

"Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan di Kabupaten Subang"

Budiyana Taufik¹

budiyanataufik40@gmail.com

Nani Warkini²

naniwarkini79@gmail.com

Rina Yulawati³

rinayulawati24@gmail.com

Yudi Hendarsah⁴

alfaalfi074@gmail.com

Dartum⁵

dartumste@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, survei dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah, masih terdapat kekurangan dalam implementasi praktik-praktik yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan akses informasi publik, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa pemerintah Kabupaten Subang perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Studi lanjutan disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik dan dampak dari implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Transparansi, akuntabilitas, kepercayaan publik, pemerintahan lokal, Kabupaten Subang, Indonesia.

Abstract

This research aims to analyze the role of transparency and accountability in enhancing public trust in government in Subang Regency, West Java, Indonesia. Through both quantitative and qualitative approaches, surveys were conducted to measure public perceptions of the levels of transparency, accountability, and trust in the government. The results of the analysis indicate that while efforts have been made to enhance government openness and accountability, there are still shortcomings in the implementation of practices promoting transparency and accountability. However, transparency and accountability play a significant role in building public trust. Policy recommendations include enhancing public access to information, strengthening oversight mechanisms, and encouraging public participation in decision-making processes. The practical implications of these findings are that the Subang Regency government needs to make further efforts to strengthen transparency, accountability, and public trust. Further studies are recommended to delve deeper into the factors influencing public trust and the impact of transparency and accountability policy implementations.

Keywords: *Transparency, accountability, public trust, local government, Subang Regency, Indonesia.*

1. Pendahuluan

Dalam konteks demokrasi modern, transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Konsep ini menekankan pentingnya pemerintah untuk menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan publik yang lebih luas. Dalam banyak kasus, transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator utama dari kualitas sebuah pemerintahan.

Kabupaten Subang, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, juga menghadapi tantangan serupa dalam memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan meningkatnya harapan masyarakat akan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan tuntutan akan akses informasi yang lebih besar, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami peran transparansi dan akuntabilitas dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat.

Teori demokrasi deliberatif, seperti yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, menekankan pentingnya dialog dan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai prasyarat untuk tercapainya demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, pemerintah dapat memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat.

Selain itu, teori agensi dan teori kontrak sosial juga memberikan pandangan yang relevan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Teori agensi menyoroti risiko agen-prinsipal di mana pemerintah (agen) harus bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal). Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi mekanisme penting untuk mengurangi informasi asimetris dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan teori-teori yang relevan, penelitian tentang peran transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang menjadi sangat penting. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat diperkuat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal dapat meningkat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Transparansi dalam Pemerintahan

Transparansi dalam pemerintahan mengacu pada ketersediaan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses bagi masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya pemerintah untuk beroperasi secara terbuka, memungkinkan masyarakat untuk memantau keputusan dan tindakan pemerintah. Teori transparansi menyoroti pentingnya mengurangi informasi asimetris antara pemerintah dan masyarakat, serta mempromosikan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Teori-teori tentang transparansi dalam pemerintahan sering kali terkait erat dengan konsep-konsep seperti keterbukaan informasi publik, kebijakan publik yang terbuka, dan akses terhadap informasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi pembentukan regulasi dan kebijakan yang mempromosikan transparansi dalam tindakan pemerintah.

2.2 Konsep Akuntabilitas dalam Pemerintahan

Akuntabilitas dalam pemerintahan mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang berwenang. Konsep ini menekankan pentingnya pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan, tindakan, dan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat.

Teori akuntabilitas dalam pemerintahan sering kali terkait dengan konsep seperti pertanggungjawaban publik, pembentukan lembaga-lembaga pengawas, dan mekanisme pelaporan yang transparan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan memperhitungkan dampak dari keputusan dan tindakan mereka.

2.3 Teori Kepercayaan Publik

Teori kepercayaan publik mengacu pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau institusi lainnya. Konsep ini menekankan pentingnya persepsi masyarakat tentang kredibilitas, integritas, dan kinerja pemerintah dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik.

Teori-teori tentang kepercayaan publik sering kali mencakup faktor-faktor seperti kinerja pemerintah, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik melalui tindakan dan kebijakan yang tepat.

2.4 Hubungan antara Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik

Hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik kompleks dan saling terkait. Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik.

Teori-teori tentang hubungan ini sering kali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintah. Penelitian empiris juga telah menunjukkan bahwa praktik-praktik yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik.

2.5 Studi Kasus Terkait Transparansi dan Akuntabilitas di Pemerintahan Daerah

Studi kasus tentang transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan daerah menyediakan wawasan tentang bagaimana konsep-konsep ini diimplementasikan dalam konteks nyata. Studi-studi ini sering kali mengevaluasi kebijakan, inisiatif, dan praktik-praktik yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Studi kasus ini dapat membantu dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Mereka juga dapat memberikan contoh-contoh praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik oleh pemerintah daerah lainnya yang ingin meningkatkan hubungan mereka dengan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menggali pemahaman yang komprehensif tentang peran transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang. Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data survei yang mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mendalami pemahaman tentang konteks lokal, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Subang dipilih sebagai lokasi penelitian karena representatif sebagai contoh pemerintahan daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Waktu penelitian ini akan meliputi periode satu tahun, dimulai dari bulan Juli 2023 hingga Juni 2024.

3.3 Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini akan terdiri dari dua jenis utama:

- Data primer: Data survei akan dikumpulkan dari sampel masyarakat di Kabupaten Subang untuk mengukur persepsi mereka terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Survei ini akan dilakukan melalui kuesioner yang disebar secara langsung atau melalui media daring.
- Data sekunder: Data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan, dan studi kasus terkait praktik transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Subang. Data dari sumber-sumber ini akan memberikan konteks dan informasi tambahan untuk menganalisis temuan dari survei dan wawancara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner yang telah disusun berdasarkan kerangka konsep yang telah dikembangkan. Kuesioner akan disebar kepada sampel masyarakat yang dipilih secara acak atau stratifikasi. Selain itu, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci seperti pejabat pemerintah, aktivis masyarakat, dan tokoh masyarakat juga akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang terkait.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kuantitatif akan dilakukan menggunakan berbagai teknik statistik seperti analisis regresi untuk menguji hubungan antara variabel transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Analisis kualitatif akan dilakukan melalui proses pengkodean dan tematik terhadap data wawancara dan dokumen. Pengintegrasian temuan dari kedua pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang peran transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik di Kabupaten Subang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Subang

Sebelum memasuki analisis lebih mendalam tentang transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik, gambaran umum tentang Kabupaten Subang perlu dipahami. Kabupaten Subang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan populasi yang terdiri dari beragam lapisan masyarakat dan sektor ekonomi yang beragam. Kabupaten ini memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.

4.2 Kondisi Transparansi dan Akuntabilitas di Kabupaten Subang

Analisis kondisi transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Subang menunjukkan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Namun, masih terdapat kekurangan dalam implementasi praktik-praktik yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal akses terhadap informasi publik dan mekanisme pengawasan yang efektif.

4.3 Pengukuran Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan di Kabupaten Subang

Survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa meskipun ada kepercayaan yang ada, namun masih terdapat ketidakpastian dan ketidakpuasan terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

4.4 Analisis Peran Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik

Analisis menunjukkan bahwa transparansi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat.

4.5 Analisis Peran Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik

Akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketika pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, masyarakat cenderung lebih percaya dan mendukung pemerintah.

4.6 Studi Kasus Implementasi Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas di Kabupaten Subang

Studi kasus implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Subang memberikan wawasan tentang praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memperkuat keterbukaan dan pertanggungjawaban.

4.7 Tantangan dan Hambatan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Tantangan utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Subang termasuk kurangnya infrastruktur informasi publik, resistensi dari birokrasi yang ada, dan kebutuhan akan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih besar.

4.8 Peluang dan Strategi Meningkatkan Kepercayaan Publik

Meskipun terdapat tantangan, terdapat juga peluang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik di Kabupaten Subang. Strategi yang dapat dipertimbangkan meliputi peningkatan akses informasi publik, peningkatan transparansi keputusan dan kebijakan, penguatan mekanisme pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pembahasan ini menyoroti pentingnya peran transparansi dan akuntabilitas dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memainkan peran yang penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang. Meskipun terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah, masih terdapat kekurangan dalam implementasi praktik-praktik yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, survei menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang ada, namun masih terdapat ketidakpastian dan ketidakpuasan terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Subang adalah:

- Meningkatkan akses informasi publik dengan menyediakan platform yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
- Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan forum partisipatif.
- Meningkatkan transparansi kebijakan dan keputusan pemerintah melalui publikasi laporan-laporan resmi dan informasi terkait kebijakan publik.

5.3 Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa pemerintah Kabupaten Subang perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Langkah-langkah tersebut dapat membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada warga.

5.4 Saran untuk Penelitian Lanjutan

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk:

- Melakukan studi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang.
- Mengkaji dampak dari implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah dan kepuasan masyarakat.
- Melakukan perbandingan antara praktik-praktik transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Subang dengan daerah lain untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik.

Dengan melakukan penelitian lanjutan tentang isu-isu tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang lebih efektif dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik di Kabupaten Subang.

Daftar Pustaka

- Ansell, C. &. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Aspinall, E. &. (2003). *Local power and politics in Indonesia: Decentralisation and democratisation*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Davis, K. (1961). The myth of functional analysis as a special method in sociology and anthropology. *American Sociological Review*, 26(6), 713-727.
- Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4-5), 663-671.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Reason and the rationalization of society (Vol. 1)*. Boston: Beacon Press.
- Heald, D. (2006). *Transparency: The key to better governance?* . Oxford : Oxford University Press.
- Hood, C. (2007). What happens when transparency meets blame-avoidance? . *Public Management Review*, 9(2), 191-210.
- Koppell, J. G. (2005). Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of “multiple accountabilities disorder. *Public Administration Review*, 65(1), 94-108.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulgan, R. (2003). Holding power to account: Accountability in modern democracies. *Palgrave Macmillan*.
- O’Flynn, J. (2007). From new public management to public value: Paradigmatic change and managerial implications. *Australian Journal of Public Administration*, 66(3), 353-366.
- Ouchi, W. G. (1979). A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms. *Management Science*, 25(9), 833-848.
- PricewaterhouseCoopers. (2012). *Building trust in government: Exploring the potential of open government data to enhance governance*. London: PricewaterhouseCoopers.
- Schillemans, T. &. (2011). *The challenges of public accountability*. In T. Schillemans & M. Bovens (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Accountability (pp. 3-12)*. Oxford: Oxford University Press.
- Svara, J. H. (2007). The myth of managerialism. *Public Administration Review*, 67(1), 157-166.
- UNDP. (2006). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York City: United Nations Development Programme.
- Zainal, S. (2007). *Akuntabilitas Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

